

Melangkah Maju, Namun Terhalang: Ketimpangan Representasi Politik Pemuda Thailand dalam Isu Demokratisasi Pasca-Pemilu 2019

Rizky Demas Arjunanda
Universitas Gadjah Mada
rizkydemasarjunanda@gmail.com

Submitted: 5 March 2024; Revised: 20 May 2024; Accepted: 16 October 2024

ABSTRACT

The global democratic backsliding has sparked the emergence of various youth movements aged 15-24 advocating for genuine democratization, such as in Hong Kong, Myanmar, and Thailand. Although they have successfully drawn public attention and expressed their aspirations, many of their demands remain inadequately addressed by representative institutions. Meanwhile, other groups that are deeply entrenched in formal politics possess disproportionate power and influence, understood as unequal political representation. This research focuses on Thai youth who, despite achieving electoral victories, find their demands for democratization and monarchical reform largely ignored by elected representatives. Previous analyses of political culture and institutional development have not clarified these representation issues within systems that possess functioning formal democratic structures. Utilizing Törnquist's concept of depoliticized democracy, this study employs qualitative methods through secondary data analysis and non-participatory observation. The findings reveal that the depoliticization of public issues and fragmentation within the youth movement create a depoliticized democracy, resulting in unequal political representation. These findings illustrate how political elites in defective democracies, such as Thailand, exploit constitutional mechanisms to maintain power and evade accountability while creating an illusion of democracy. Meanwhile, it also highlights the challenges faced by youth in consolidating their diverse movements. Ultimately, this research suggests that youth represent a significant new socio-political force in Thailand and provides insights into the broader democratic backsliding occurring in Southeast Asia.

KEYWORDS Unequal Political Representation | Thai youth movements | Democratization | Depoliticized Democracy | Power Dynamics

PENDAHULUAN

Kemunduran demokrasi global telah memicu munculnya gerakan pemuda, khususnya mereka yang berusia 15-24 tahun, untuk mewujudkan demokratisasi nyata seperti di Hong Kong, Myanmar, dan Thailand (Sastramidjaja 2023:2). Kemajuan teknologi dan globalisasi memungkinkan mereka menggunakan strategi kreatif baru dalam menyuarakan aspirasi mereka.

Meskipun berhasil menarik perhatian publik dan mempertahankan momentum, aspirasi pemuda belum terakomodasi dan kurang direspons secara substansial oleh institusi representasi. Sementara itu, kelompok lain menikmati kekuasaan dan pengaruh yang tidak proporsional, yang mencerminkan fenomena ketimpangan representasi politik (Verba 2003). Tren ini menyoroti pentingnya

memahami penyebab ketimpangan representasi politik pemuda dalam mencapai demokratisasi substansial.

Salah satu contoh penting ketimpangan representasi politik pemuda adalah terhalangnya tuntutan-tuntutan gerakan pemuda Thailand pasca-Pemilu 2019. Gerakan ini memperjuangkan tiga tuntutan utama, yaitu pembentukan konstitusi baru yang menempatkan raja di bawah kedaulatan rakyat, pencabutan undang-undang *lèse-majesté* yang melarang kritik terhadap raja, dan pemisahan aset pribadi raja dari aset kerajaan. Meski ketiga tuntutan ini menyoroti isu-isu krusial demokratisasi, upaya tersebut terus terhalang oleh penundaan berulang dan berakhir dengan penolakan pembahasan amendemen konstitusi di parlemen hingga tak lagi menjadi agenda (Bangkok Post 2020d). Ini berbanding terbalik dengan mosi-mosi dari koalisi pemerintah, yang meskipun sering bertentangan dengan aspirasi pemuda, justru mendapat tingkat penerimaan hingga 96% (Wacharasindhu 2021).

Gerakan pemuda Thailand muncul sebagai reaksi terhadap penurunan kualitas demokrasi sejak pemerintahan pasca-kudeta 2014 dan disahkannya Konstitusi 2017. Puncak ketidakpuasan terjadi pada Februari 2020, ketika Future Forward Party (FFP), sebuah partai politik baru yang dianggap merepresentasikan pemuda, dibubarkan. Kejadian ini memicu gelombang protes harian di setidaknya 62 provinsi (McCargo 2021:10). Free Youth Movement (FYM), motor utama protes, tumbuh menjadi jaringan aktivis pemuda dari beragam latar belakang. Mereka memanfaatkan media sosial dan saluran komunikasi digital untuk berkoordinasi hingga mampu mempertahankan protes selama tiga tahun, dari 2020 hingga 2022 (Olsen 2023). Meskipun gigih dan inovatif, tuntutan-tuntutan pemuda belum mendapatkan perhatian berarti di parlemen dibanding kelompok lainnya. Konteks ini menyoroti pentingnya memahami penyebab ketimpangan representasi politik

pemuda Thailand pasca-Pemilu 2019.

Dalam memahami permasalahan representasi politik, penulis mengidentifikasi tiga pendekatan. Pertama adalah pendekatan kultur politik, yang mengacu pada pola orientasi psikologis individu terhadap objek politik yang membentuk budaya politik masyarakat (Almond & Verba 1963). Dalam pendekatan ini, kultur politik dibagi tiga, yaitu *parochial* (kesadaran politik rendah), *subject* (kesadaran politik lebih tinggi tetapi pasif), dan *participant* (kesadaran politik tinggi dan aktif), di mana hanya kultur *participant* yang dianggap memiliki representasi politik ideal. Penulis mengkritik generalisasi ini, karena menurut Barrington (2009), kultur politik bersifat variatif dan tidak homogen.

Kedua adalah pendekatan institusi, yang menekankan peran institusi sebagai aturan dan norma formal dan informal yang mengatur interaksi ekonomi dan sosial (North 2009:3). Pendekatan ini berargumen bahwa institusi yang ideal dapat mengakomodasi berbagai kelompok dan identitas sosial, dan kegagalan untuk membangun institusi demokratis yang inklusif dapat merusak keadilan representasi politik, terutama bagi kelompok terpinggirkan (Nelson 2011; Gilens 2012; Hessami & de Fonseca 2020; Mansbridge 1999; Stockemer & Sundström 2018). Penulis mengkritik pendekatan ini karena elite politik yang mengklaim merepresentasikan kelompok tertentu tidak selalu mencerminkan aspirasi mereka, serta mengabaikan dinamika kompleks interaksi kekuasaan antar kelompok sosial, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan representasi politik, meskipun terdapat peraturan dan kebijakan afirmatif untuk melindungi keberagaman.

Karenanya, diperlukan pendekatan alternatif untuk melampaui kritik-kritik sebelumnya. Penulis mendukung pendekatan ketiga, yaitu berbasis kekuasaan yang menekankan bahwa representasi politik mengalami kecacatan ketika terjadi demokrasi

yang terdepolitisasi, yang ditunjukkan dengan terdepolitisasinya isu publik dan terfragmentasinya gerakan rakyat (Törnquist 2009:1). Terdepolitisasinya isu publik terjadi ketika dimensi politik seperti pertentangan dan perdebatan dalam pengambilan keputusan dihilangkan atau diminimalkan, baik dengan mengeluarkan isu tersebut dari ranah politik, membatasi diskresi representatif terpilih, atau mengalihkan otoritasnya ke institusi independen, sehingga mengakibatkan pelemahan kedaulatan rakyat dalam pembuatan kebijakan (Mishra 2011:165). Sementara itu, terfragmentasinya gerakan rakyat terjadi ketika gerakan terpecah dan gagal berkonsolidasi untuk memajukan agendanya (Törnquist 2009:1). Pendekatan ini melampaui kritik sebelumnya dengan langsung menyoroti proses akuntabilitas dan komponen-komponen representasi politik dalam rantai kedaulatan rakyat, yaitu partisipasi rakyat, isu publik, dan peran perantara politik sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan representasi politik (Törnquist 2009:10-13).

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa ketimpangan representasi politik pemuda Thailand dalam isu demokratisasi pasca-Pemilu 2019 sebagai variabel dependen ('Y') disebabkan oleh terjadinya demokrasi yang terdepolitisasi sebagai variabel independen ('X') dengan menggunakan kasus ketimpangan artikulasi substantif tuntutan pemuda oleh representatif terpilih pasca-Pemilu 2019. Hubungan antara kedua variabel ini saling berjalanan dan berbanding lurus melalui dua mekanisme yang berkembang bersamaan, yaitu terdepolitisasinya isu demokratisasi dan terfragmentasinya gerakan pemuda.

KERANGKA KONSEPTUAL

Demokrasi yang Terdepolitisasi

Penelitian ini menganalisis

permasalahan representasi politik menggunakan konsep demokrasi yang terdepolitisasi dari Törnquist (2009). Tujuan utama demokrasi adalah menegakkan kedaulatan rakyat, yang berarti otoritas tertinggi untuk membuat keputusan kolektif berada di tangan rakyat, bukan di tangan kelompok tertentu (Beetham 1999). Namun, pertumbuhan populasi dan kompleksitas masyarakat membuat demokrasi langsung menjadi tidak praktis. Karenanya, demokrasi kerakyatan atau popular democracy berkembang, di mana rakyat memilih representatif untuk membuat keputusan atas nama mereka. Representasi politik menjadi komponen kunci yang menghubungkan kepentingan rakyat dengan proses pengambilan keputusan, sehingga suara mereka tetap didengar dalam pembuatan kebijakan meskipun tidak terlibat langsung (Pitkin 1967:8).

Törnquist (2009:10-13) mengembangkan kerangka kerja di mana representasi politik ideal. Ini terjadi ketika tiga komponen representasi berfungsi optimal dalam rantai kedaulatan rakyat (*chain-of-popular-sovereignty*), yaitu kemampuan rakyat untuk mengartikulasikan kepentingan, kontrol rakyat atas urusan publik, dan perantara yang memfasilitasi hubungan antara rakyat dan urusan publik, seperti institusi legislatif dan eksekutif.

Namun, banyak rezim terlihat demokratis tetapi tidak mencerminkan prinsip demokrasi yang dikenal sebagai demokrasi cacat atau *defective democracy*. Konsep demokrasi yang terdepolitisasi muncul untuk memahami rezim ini, yaitu ketika struktur formal demokrasi ada, tetapi substansi kedaulatan rakyat dan partisipasi publik melemah sehingga meskipun rakyat dapat memilih, pengaruh mereka terhadap kebijakan terbatas (Törnquist 2009:4). Ini dapat mengakibatkan ketimpangan representasi politik, di mana kepentingan kelompok tertentu diabaikan, sementara kelompok lain memegang kekuasaan yang tidak

proporsional (Verba 2003). Dua fenomena yang menandainya adalah terdepolitisasinya isu publik dan terfragmentasinya gerakan rakyat.

Terdepolitisasinya isu publik terjadi ketika aspek-aspek politik dari isu-isu publik, seperti perdebatan dalam pengambilan keputusan, dihilangkan atau diminimalkan (Burnham 2014:189). Depolitisasi dapat dilakukan melalui tiga mekanisme; yaitu pengeluaran isu dari ranah politik, pembatasan diskresi representatif terpilih, dan pengalihan pengelolaan isu ke institusi independen di luar kedaulatan rakyat (Mishra 2011:165). Akibatnya, elite dapat mengontrol agenda politik tanpa gangguan berarti representatif terpilih, sehingga isu-isu penting dapat dihindari atau tidak dibahas dalam diskusi publik. Ini mengakibatkan terasingnya kepentingan rakyat dan berkurangnya kemampuan mempengaruhi kebijakan, yang menunjukkan melemahnya kedaulatan rakyat.

Terfragmentasinya gerakan rakyat terjadi ketika gerakan terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang tidak terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan baik (Djani et. al. 2017:2). Ini dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, seperti konflik internal dan adaptasi terhadap lingkungan otoriter. Akibatnya, gerakan gagal menyuarakan kepentingan secara kolektif, sehingga kesulitan memajukan aspirasi dengan jelas yang menunjukkan melemahnya kedaulatan rakyat.

Ketika kedua fenomena ini berjalan, representasi politik cacat dan demokrasi terdepolitisasi. Meskipun rakyat terlibat dalam diskusi politik, pengaruhnya terhadap kebijakan terbatas, sehingga kepentingannya tidak tercermin dalam pembuatan kebijakan dibandingkan dengan kepentingan kelompok elite, yang mencerminkan ketimpangan representasi politik. Di Thailand, ketimpangan representasi politik ditunjukkan dengan terdepolitisasinya isu-isu demokratisasi dan

terfragmentasinya gerakan pemuda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode riset kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis ketimpangan representasi politik pemuda Thailand pasca-Pemilu 2019. Studi kasus dipilih karena fleksibilitasnya dalam eksplorasi mendalam dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber (Baxter & Jack 2008:544). Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan non-partisipan dan sumber sekunder, termasuk artikel berita, laporan LSM, unggahan media sosial, dan dokumen pemerintah, untuk menggambarkan fenomena dan pernyataan aktor kunci. Validitas data diperkuat dengan menggunakan sumber lokal dan verifikasi terjemahan.

Dalam menjelaskan penyebab ketimpangan representasi politik pemuda Thailand pasca-Pemilu 2019 sebagai variabel dependen ('Y'), penelitian ini mengidentifikasi demokrasi yang terdepolitisasi sebagai variabel independen ('X'). Keduanya dihubungkan melalui dua mekanisme yang saling berjalanan dan berkembang bersamaan, yaitu terdepolitisasinya isu demokratisasi dan terfragmentasinya gerakan pemuda.

TUNTUTAN-TUNTUTAN PEMUDA DALAM ISU DEMOKRATISASI

Tuntutan pemuda tercermin dalam rangkaian protes antara 2020-2022. Protes ini dipicu oleh pembubaran Future Forward Party (FFP), sebuah partai pro-demokrasi yang populer di kalangan pemuda. Pembubaran tersebut dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada 21 Februari 2020 melalui keputusan kontroversial (BBC News, 2020). Terdapat tiga tuntutan pemuda terkait isu demokratisasi.

Tuntutan pertama adalah penghapusan Pasal 6 Konstitusi 2017. Dalam aksi protes

pada September 2020, aktivis 'Penguin' Parit Chiwarak menggunakan analogi, "If a dog in a nearby house annoys you because it keeps barking, would you go out and fight the dog and tell it to stop barking? Or would you go out and talk to the owner of the dog to make it stop barking?" (Reed 2020). Analogi ini mencerminkan akar krisis politik Thailand, di mana kekuatan monarki yang tak tersentuh mendukung jaringan autokrasi pro-monarki untuk mempertahankan posisi dan mengeksploitasi kekuasaan. Pemuda percaya solusi krisis ini adalah mereformasi peran monarki, termasuk penghapusan Pasal 6 yang meletakkan raja di luar kedaulatan rakyat dengan menyatakan, "The King shall be enthroned in a position of revered worship and shall not be violated. No person shall expose the King to any sort of accusation or action" (Kingdom of Thailand 2017:4). Tuntutan ini pertama kali disampaikan oleh 'Rung' Panusaya Sithjirawattanakul, pemimpin United Front of Thammasat and Demonstration (UFTD), pada aksi protes 10 Agustus 2020 sebagai poin pertama dari 10-point demands (Prachatai 2020).

Tuntutan kedua adalah penghapusan hukum *lèse-majesté*, yaitu Pasal 112 Kitab Undang-Undang Pidana Thailand, yang melarang kritik terhadap raja dan calon penerusnya dengan ancaman hukuman penjara hingga lima belas tahun (Kingdom of Thailand 1956). Selama protes 2020-2022, pemerintah memanfaatkan hukum ini untuk menekan oposisi dan menuntut aktivis (Article 19 2022:37-40). Tuntutan ini merupakan poin kedua dari 10-point demands (Prachatai 2020).

Tuntutan ketiga adalah pengembalian pengelolaan aset dan finansial kerajaan kepada publik. Crown Property Bureau (CPB), badan yang mengelola aset kerajaan seperti real estat dan saham perusahaan besar seperti Siam Commercial Bank (SCB) dan Siam Cement Group (SCG). Sebelumnya badan ini dikelola pemerintah (Thai Enquirer 2020). Namun,

setelah pelantikan Raja Vajiralongkorn, kepemilikan dan kontrol atas CPB sepenuhnya diserahkan kepada raja melalui amendemen Crown Property Act 2017 dan 2018. Ini menjadikannya independen dari akuntabilitas pemerintah, meskipun menerima dana hampir US\$1 miliar per tahun pada 2020 dan dibebaskan dari pajak (SCMP 2020). Pemuda menuntut pemisahan aset pribadi raja dari aset kerajaan, pengurangan alokasi anggaran monarki, dan audit terbuka atas aset kerajaan. Tuntutan ini adalah poin keempat dari 10-point demands di mana "The people demand back national assets from the king" (DW 2020).

KETIMPANGAN ARTIKULASI TUNTUTAN PEMUDA OLEH REPRESENTATIF TERPILIH

Ketimpangan dalam artikulasi tuntutan substantif pemuda oleh representatif terpilih tercermin dari minimnya pembahasan parlemen mengenai tuntutan-tuntutan pemuda. Meskipun sepertiga kursi di majelis bawah diisi oleh representatif terpilih dari Move Forward Party (MFP), diskusi sering kali terbatas pada aspek teknis dan prosedural, tanpa menanggapi atau menolak tuntutan pemuda, seperti penghapusan Pasal 6 Konstitusi 2017, hukum *lèse-majesté*, dan pemisahan aset kerajaan. Ketimpangan ini semakin jelas dengan mosi dari koalisi pemerintah, yang bertentangan dengan kepentingan pemuda, memiliki tingkat penerimaan sebesar 96% di parlemen (Wacharasindhu 2021).

Contohnya, setelah rangkaian panjang aksi protes, pada 26 Agustus 2020, parlemen menerima *10-point demands* dari kelompok pemuda (Bangkok Post 2020f), tetapi tanggapan yang muncul menghindari diskusi substantif dan mengabaikan tuntutan tersebut (Sattaburut & Chetchotiros 2020). Keengganan untuk mengakomodasi tuntutan pemuda, terutama terkait amendemen pasal-pasal Konstitusi 2017, terlihat dari pernyataan representatif

Palang Pracharath Party (PPP), Weerakon Khampragob, yang menegaskan, “*We won’t touch Section 1 and 2 which concern the monarchy*” (BenarNews 2020). Meskipun demikian, pemuda tetap berupaya dengan mengajukan rancangan amendemen melalui Internet Dialogue on Law Reform (iLaw), yang mengumpulkan lebih dari 100.732 tanda tangan (Bangkok Post 2020c), tetapi ditolak oleh senat pada 18 November 2020 (Bangkok Post 2020b).

Di sisi lain, upaya legislatif terlambat MFP untuk membahas pemotongan anggaran monarki pada 18 Agustus 2021 merupakan langkah yang kurang signifikan, mengingat dukungan minim dari partai lain di parlemen. Usulan ini tidak mendapatkan respons serius, memicu konflik internal, dan menghadapi serangan balik dari koalisi pemerintah. Akhirnya, usulan ini dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap menghina raja, menjadi langkah terakhir sebelum parlemen dibubarkan pada 2023 (Prachatai 2021).

Dapat disimpulkan bahwa representatif terpilih, terutama dari partai-partai yang mengklaim merepresentasikan pemuda, sering kali terhalang oleh hambatan politik yang menyebabkan mereka terpaksa tidak mengartikulasikan tuntutan pemuda terkait isu demokratisasi dan reformasi monarki. Ini menunjukkan ketimpangan representasi politik.

DEMOKRASI YANG TERDEPOLITISASI

Penelitian ini berargumen bahwa ketimpangan representasi politik pemuda Thailand dalam isu demokratisasi pasca-Pemilu 2019 disebabkan oleh demokrasi yang terdepolitisasi. Ini terjadi ketika kedua kondisi berjalan dan beriringan, yaitu terdepolitisasinya urusan publik dan terfragmentasinya gerakan rakyat, yang dalam kasus Thailand tercermin dalam terdepolitisasinya isu demokratisasi dan terfragmentasinya gerakan pemuda.

A. Terdepolitisasinya Isu Demokratisasi

Terdepolitisasinya isu publik adalah kondisi di mana dimensi politik dari isu-isu publik, seperti perdebatan dan pertentangan dalam pengambilan keputusan, dikurangi atau dihilangkan sehingga mencederai komponen kontrol rakyat atas urusan publik dan peran institusi perantara (Burnham 2014:189). Ini terjadi melalui tiga mekanisme, yaitu pengeluaran isu dari ranah politik, pembatasan diskresi representatif terpilih, dan pengalihan pengelolaan isu ke institusi independen di luar kedaulatan rakyat (Mishra 2011:165). Akibatnya, kontrol rakyat atas urusan publik semakin lemah, dan perdebatan yang substansial dalam pengambilan keputusan menjadi tidak efektif. Ini digantikan oleh argumen teknis seperti “tidak sesuai prosedur,” “bukan kewenangan,” dan “melanggar hukum.”

Dalam kasus Thailand, isu demokratisasi terdepolitisasi pasca-Kudeta Militer 2014. Jaringan autokrasi pro-monarki, yang terdiri dari monarki, militer, polisi, dan birokrat pro-monarki, menerapkan taktik depolitisasi untuk menghilangkan kontestasi politik terkait pengaturan monarki. Setelah raja merestui kudeta yang dipimpin Jenderal Prayut Chan-o-cha, kelompok ini menjadi elite penguasa yang setia kepada monarki. National Council for Peace and Order (NCPO), pemerintahan junta militer yang berisi jaringan tersebut, memanfaatkan kekuasaan absolutnya untuk memperkuat dominasi mereka dengan menunjuk satu sama lain untuk menyusun konstitusi baru (Kongkirati 2016). Pemimpin Partai Pro-Monarki PPP, Somsak Thapsutin, mengakui, “*This constitution was designed for us*” (CH3Thailand 2018). Hasil dari kesepakatan ini menunjukkan tiga mekanisme depolitisasi isu demokratisasi.

1. Penolakan pembahasan mengenai kontrol terhadap monarki

Mekanisme pertama adalah penolakan pembahasan pengaturan monarki sebagai

bentuk penolakan politik formal representatif terpilih. Ini dilakukan NCPO melalui penerapan instrumen-instrumen legal yang secara langsung mengeluarkan pengaturan monarki dari kewenangan representatif terpilih.

Pertama adalah Pasal 6 Konstitusi 2017 yang menetapkan, "*The King shall be enthroned in a position of revered worship and shall not be violated. No person shall expose the King to any sort of accusation or action*" (Kingdom of Thailand 2017:4). Pasal ini memberi raja imunitas penuh dari pengawasan publik, menempatkan monarki di atas hukum dan menghalangi akuntabilitas atas aktivitas dan aset kerajaan. Meskipun ada struktur demokrasi formal, pasal ini membatasi reformasi dan pengawasan publik yang menyimpang dari prinsip demokrasi. Contoh penerapan ketentuan ini adalah penolakan mosi Move Forward Party (MFP) pada 10 Februari 2021 untuk memperingan hukum *lèse-majesté*, dengan alasan teknis bahwa mosi tersebut melanggar Pasal 6 (Sangiam 2021).

Kedua adalah Pasal 65 Konstitusi 2017 yang menetapkan, "*The State should set out a national strategy as a goal for sustainable development of the country under the principle of good governance to be used as a framework for formulating consistent and integrated plans in a congruous force to achieve such goal*" (Kingdom of Thailand 2017:21). Pasal ini memberikan NCPO wewenang luas dalam membatasi arah kebijakan dan alokasi anggaran, sekaligus mengekang pembahasan isu monarki. Melalui 20-Year National Strategy Plan yang disahkan pada 2018 dan berlaku hingga 2037, strategi ini membatasi gerak partai politik dan representatif terpilih dalam menyusun agenda (Bangkok Post 2018). Setiap pelanggaran terhadap strategi ini dikriminalisasi, yang berdampak signifikan pada fungsi representatif terpilih di parlemen dan mempersempit ruang partisipasi publik. Konsekuensinya, jaringan autokrasi pro-monarki semakin menguat tanpa perlawanan berarti dari oposisi atau masyarakat sipil,

berbeda dengan negara lain di mana strategi nasional masih tunduk pada pengawasan dan partisipasi publik yang kuat.

Ketiga adalah Pasal 255 Konstitusi 2017 yang menetapkan, "*An amendment to the Constitution which amounts to changing the democratic regime of government with the King as Head of State or changing the form of the State shall be prohibited*" (Kingdom of Thailand 2017:97). Pasal ini efektif memblokir upaya untuk mengubah Bagian 1 dan 2 Konstitusi yang menetapkan dasar negara sebagai Democratic Regime with King as the Head of State (DRKH) di bawah Pasal 6. Akibatnya, pasal ini menghalangi diskusi tentang posisi dan akuntabilitas monarki, bahkan dalam bentuk yang paling sederhana, dan membatasi representatif terpilih dalam mengusulkan perubahan yang mencerminkan aspirasi rakyat. Dengan kekuasaan politik dan militer terpusat pada jaringan autokrasi pro-monarki, pasal ini memperkuat kontrol atas agenda politik nasional dan menghalangi usaha reformasi apa pun untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif.

Keempat adalah hukum *lèse-majesté*, yang berfungsi sebagai alat kriminalisasi atas pelanggaran terhadap ketentuan Konstitusi 2017 sebelumnya. Pasal 112 KUHP menetapkan, "*Whoever defames, insults or threatens the King, the Queen, the Heir-apparent or the Regent, shall be punished with imprisonment of three to fifteen years*" (Kingdom of Thailand 1956:30). Penggunaan istilah-istilah multi-interpretatif seperti 'mencemarkan', 'menghina', dan 'mengancam' memungkinkan hukum digunakan untuk membungkam kritik terhadap monarki, seperti dalam kasus Suporn Atthawong, staf perdana menteri, yang menuntut Thanathorn Juangroongruangkit atas kritiknya terhadap monopoli distribusi vaksin oleh Siam Bioscience, perusahaan milik raja (Tanakasempipat 2021).

Pasal-pasal ini menyebabkan artikulasi tuntutan-tuntutan pemuda untuk mengkritik pengaturan monarki oleh representatif terpilih

dikriminalisasi. Akibatnya, representatif terpilih gentar dan usaha-usahanya menjadi kontraproduktif.

2. Pembatasan kekuasaan representatif terpilih melalui kekuasaan luas badan-badan tak terpilih

Pembatasan kekuasaan representatif terpilih melalui kekuasaan luas badan-badan tak terpilih adalah bentuk pembatasan diskresi representatif terpilih sehingga pengaruhnya terbatas. Kekuasaan ini berfungsi sebagai mekanisme veto untuk menunda, menolak, dan membatalkan proses demokratis yang berupaya membahas kepentingan di luar jaringan autokrasi pro-monarki, dengan tujuan mempertahankan hegemoninya dan menggagalkan upaya peningkatan kontrol terhadap monarki. Terdapat tiga badan tak terpilih yang memiliki kekuasaan luas yang melemahkan pengaruh representatif terpilih.

Pertama adalah Senat, majelis atas dalam Parlemen Thailand. Pasal 269 Konstitusi 2017 menyatakan bahwa Senat terdiri dari 250 senator yang sepenuhnya ditunjuk oleh NCPO, dengan enam posisi untuk pejabat tinggi militer dan polisi (Kingdom of Thailand 2017:109-111). Sekitar 40% senator adalah pejabat militer, sementara sisanya merupakan birokrat dan kelompok sipil yang berasosiasi dengan monarki (Wacharasindhu 2021). Meskipun tak terpilih, Senat memiliki kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar untuk membatasi pengaruh partai politik dan representatif terpilih. Salah satu kekuasaan utama Senat adalah menunda dan memblokir amendemen konstitusi. Meskipun senator tidak dapat menolak rancangan amendemen secara langsung, mereka dapat menolak penerimaannya. Menurut Pasal 256 (3) Konstitusi 2017, setidaknya 84 dari 250 senator harus mendukung amendemen agar dapat diterima, sehingga menyulitkan proses amendemen yang bertentangan dengan kepentingan Senat (Kingdom of Thailand 2017:97).

Sejak memulai perannya pada 2019, Senat secara aktif menghambat amendemen

konstitusi, menyebabkan beberapa usulan terus tertunda atau dihapus dari agenda. Misalnya, pembahasan untuk mengamendemen Pasal 256 Konstitusi 2017 mengenai proses amendemen dibatalkan setelah penundaan berulang kali (Pattaya Mail 2021). Di sisi lain, Senat mendukung mosi koalisi pemerintah yang didominasi jaringan autokrasi pro-monarki dengan tingkat penerimaan 96% (Wacharasindhu 2021). Ini menunjukkan bahwa Senat memiliki pengaruh jauh lebih besar daripada representatif terpilih dan berfungsi sebagai mekanisme veto terhadap tuntutan yang bertentangan dengan kepentingan jaringannya, termasuk tuntutan pemuda untuk mengubah pengaturan monarki dalam konstitusi.

Kedua adalah badan independen seperti Komisi Pemilihan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman, yang ditunjuk oleh Senat. Ketiga badan ini memiliki kekuasaan untuk menyingkirkan representatif terpilih dan membubarkan partai politik melalui petisi ke Mahkamah Konstitusi, sesuai Pasal 92 Political Parties Act 2017 dan Organic Act on the Election of Members of the House of Representatives 2018, yang mencantumkan tiga belas dasar pembubaran. Alasan yang digunakan sering kali ambigu, seperti "...failure to act according to the Democracy with the King as Head of State" (Kingdom of Thailand 2018), sehingga dapat diinterpretasikan secara liar.

Contoh penggunaan kekuasaan badan-badan independen ini adalah saat Komisi Pemilihan berhasil membubarkan FFP pada Februari 2020 dengan mengajukan petisi kepada Mahkamah Konstitusi (BBC News 2020). Pada 21 November 2021, anggota Ombudsman Nattaporn Toprayoon juga mengajukan petisi kepada Komisi Pemilihan untuk membubarkan MFP karena mendukung gerakan pemuda (Bangkok Post 2021b). Ketiga badan ini berfungsi sebagai mekanisme veto terhadap tuntutan yang bertentangan dengan kepentingan jaringan autokrasi pro-monarki, sehingga usaha representatif terpilih untuk

mengartikulasikan tuntutan pemuda menjadi kontraproduktif.

Ketiga adalah Mahkamah Konstitusi, pengambil keputusan tertinggi di Thailand. Sesuai Pasal 204 Konstitusi 2017, semua hakim ditunjuk oleh Senat, yang membuatnya bagian dari jaringan autokrasi pro-monarki (Kingdom of Thailand 2017:76). Mahkamah Konstitusi memiliki dua kekuasaan luas untuk membatasi pengaruh representatif terpilih. Pertama, sebagai penentu pelanggaran konstitusi. Mahkamah dapat melarang tuntutan tertentu, membubarkan partai politik, dan menyingkirkan representatif yang bertentangan dengan kepentingan elite politik. Selain itu, Mahkamah memiliki imunitas dalam Organic Act on Procedures of the Constitutional Court 2018, memungkinkannya untuk menafsirkan kritik terhadap putusannya sebagai pelanggaran, dengan istilah ambigu seperti 'tujuan tidak baik' atau 'sarkasme', yang berakibat hukuman penjara tanpa kesempatan banding (Engchanil 2020).

Kekuasaan ini telah digunakan untuk membubarkan partai dan menghukum representatif terpilih. Contohnya, pada 21 Februari 2020, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membubarkan FFP dan melarang 16 petinginya berpolitik selama 10 tahun, berdasarkan interpretasi hukum kontroversial (Bangkok Post 2020a). Pada 10 November 2021, hakim-hakim Mahkamah Konstitusi melarang tuntutan gerakan pemuda, yaitu 10-point demands, setelah menerima petisi dari Ombudsman (Ratcliffe 2021). Mahkamah mendakwa bahwa tuntutan tersebut melanggar Pasal 45 Konstitusi 2017 dan berpotensi dijerat dengan hukum makar, yang bisa berujung hukuman mati (Kingdom of Thailand 2017:14). Ini membuat tuntutan pemuda dipandang sebagai ancaman terhadap rezim, sehingga usaha representatif terpilih untuk mengartikulasikan kembali tuntutan tersebut menjadi kontraproduktif.

Kekuasaan luas kedua Mahkamah Konstitusi adalah memberikan tinjauan yudisial yang menjadi keputusan tertinggi yang harus dirujuk oleh parlemen. Sesuai Pasal 144 Konstitusi 2017, setidaknya sepersepuluh dari representatif terpilih dan Senat dapat mengajukan permintaan tinjauan yudisial kepada Mahkamah Konstitusi, di mana opininya bersifat final (Kingdom of Thailand 2017:53-54).

Kekuasaan ini digunakan secara efektif oleh anggota parlemen seperti Senator Sawaengkan dan Paiboon Nittitawan dari PPP untuk mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang menghalangi amendemen konstitusi. Pada 12 Maret 2021, Mahkamah memutuskan bahwa amendemen harus melalui dua referendum, sebelum dan setelah rancangan dibuat (The Star 2021). Keputusan ini memudahkan Senat untuk memblokir upaya amendemen dengan alasan, seperti tingginya biaya referendum. Putusan ini juga digunakan oleh senator untuk menolak rancangan amendemen pada 23 Juni (Liengboonlertchai 2021), menjadikan usaha representatif terpilih untuk menyampaikan tuntutan pemuda menjadi kontraproduktif.

Kekuasaan tiga badan tak terpilih ini membuat proses amendemen konstitusi tidak mungkin dilakukan, menjadikan representatif terpilih tak berdaya dalam membahas isu yang bertentangan dengan kepentingan jaringan autokrasi pro-monarki (Sawasdee 2020). Akibatnya, tuntutan pemuda terus terhalang untuk diartikulasikan oleh representatif terpilih.

3. Privatisasi Pengaturan Monarki

Privatisasi pengaturan monarki merupakan bentuk privatisasi isu publik. Ini dilakukan dengan memberlakukan instrumen-instrumen legal yang memberikan kekuasaan penuh terhadap pengaturan isu publik kepada badan-badan independen yang berada di luar kontrol pemerintahan, sehingga tidak dapat dimintai akuntabilitas dan transparansi, dan

tidak lagi menjadi bagian dari perdebatan publik.

Pertama adalah amendemen Crown Property Act 2017 dan 2018. Act ini, yang awalnya disahkan pada 1936 untuk memisahkan kekayaan kerajaan dari aset pribadi raja, memberikan pengelolaan aset kerajaan kepada Crown Property Bureau (CPB) di bawah Kementerian Keuangan (Thai Enquirer 2020). Namun, amendemen tersebut mengalihkan hak pengelolaan aset dan keuangan kerajaan menjadi hak eksklusif raja dan diatur berdasarkan kebijakannya (Chia & Parpart 2020). Ini terbukti dengan transfer saham Siam Commercial Bank (SCB) senilai US\$8,3 miliar ke akun pribadi raja oleh CPB pada Juni 2018 (Jagtiani 2018). Kritik terhadap tindakan ini melanggar hukum *lèse-majesté*, menjadikan upaya representatif terpilih untuk mengubah pengaturan aset kerajaan kontraproduktif.

Kedua adalah Pasal 10 dan 11 Konstitusi Thailand 2017 yang mengatur Privy Council, badan penasihat raja. Pasal 10 menegaskan bahwa Privy Council memberikan nasihat eksklusif kepada raja, sementara Pasal 11 memberi raja kekuasaan penuh untuk menunjuk dan memberhentikan anggota penasihat (Kingdom of Thailand 2017:5). Dengan demikian, peran raja telah diprivatisasi dan keterlibatan parlemen dihapuskan. Selain itu, hukum *lèse-majesté* melindungi raja dari kritik dengan menindak setiap ajuan perubahan dalam pengaturan monarki. Akibatnya, pasal-pasal ini menghalangi representatif terpilih untuk mengartikulasikan aspirasi yang berbeda dari kehendak raja.

Instrumen-instrumen legal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan monarki telah diprivatisasi, diserahkan kepada raja melalui CPB dan Privy Council, memberinya kekuasaan untuk mengelola tindakan, aset, dan keuangannya sendiri. Akibatnya, representatif terpilih tidak dapat mengartikulasikan tuntutan pemuda.

B. Terfragmentasinya Gerakan Pemuda

Terfragmentasinya gerakan rakyat terjadi ketika gerakan terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil dan tidak terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan baik sehingga mencederai komponen kemampuan rakyat dalam mengartikulasikan kepentingannya (Djani et. al. 2017:2). Ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan, baik faktor internal maupun eksternal.

Di Thailand, gerakan pemuda terfragmentasi selama aksi protes 2020-2022. Gerakan ini dimulai dengan koordinasi di kalangan mahasiswa setelah Mahkamah Konstitusi membubarkan Future Forward Party (FFP) (BBC News 2020). Awalnya, Free Youth Movement (FYM) dan United Front of Thammasat and Demonstration (UFTD) menjadi penyelenggara utama yang mengajukan tiga tuntutan pada 18 Juli 2020 (Unno 2021). Namun, seiring waktu, kelompok utama terpecah dan muncul kelompok baru dengan demografi dan agenda beragam. Pada akhirnya, gerakan mulai kehilangan momentum pada akhir 2021, yang diperparah dengan pembatasan akibat pandemi COVID-19. Ini terjadi sejalan dengan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu adaptasi terhadap lingkungan otoriter, dampak propaganda dan serangan balasan, serta konflik internal dan prioritas yang berbeda.

1. Adaptasi Terhadap Lingkungan Otoriter

Gerakan pemuda menghadapi tekanan besar dari jaringan autokrasi pro-monarki yang menguasai pemerintahan yang memanfaatkan peraturan seperti Public Assembly Act 2015 untuk membatasi protes dan menggunakan kekerasan fisik, seperti meriam air bertekanan tinggi dan gas air mata (Article 19 2022:11). Penggunaan meriam bertekanan tinggi terjadi dalam aksi protes pada 16 Oktober, serta pada 8 dan 17 November 2020 sedangkan penembakan peluru karet meningkat pada aksi protes 20 Maret, 18 Juli, dan 7 Agustus 2021 (Nikkei Asia 2020). Penghalang fisik, seperti kawat berduri,

bis, kontainer kargo, dan tong minyak, juga diterapkan dalam lebih dari dua puluh aksi protes dari November 2020 hingga 2021 (Article 19 2022:25-26).

Aktivis sering mengalami gangguan dan intimidasi melalui kunjungan ke rumah atau asrama mereka dan dimata-matai dengan Pegasus Spyware (FEDC 2022). Polisi juga telah menuntut lebih dari 1.186 individu dalam 1.159 kasus terkait aksi protes, dengan 239 tuntutan hukum *lèse-majesté* dari Juli 2020 hingga November 2022 (TLHR 2022). Penangkapan pemimpin dan partisipan gerakan sebelum protes juga sering terjadi, seperti penangkapan anggota WeVolunteer pada 24 November 2020 dan 6 Maret 2021 (Article 19 2022:34).

Sebagai respons terhadap tekanan, gerakan pemuda mengadopsi strategi tanpa pemimpin (*leaderless resistance*) dan mendesentralisasi operasinya seperti Gerakan Payung di Hong Kong (Jha 2020). Penggerak utama protes seperti FYP, UFTD, Student Union of Thailand, dan Bad Student membentuk jaringan protes yang longgar di seluruh negeri, termasuk kelompok seperti Free People dan Coalition of Lanna Students, People's Revolution for Equality and Democracy, Mahasarakham Students Group, dan KKC Pakee Students (Lertchoosakul 2021). Mereka memanfaatkan kampanye media sosial dan flashmob spontan dengan koordinasi melalui platform seperti Twitter menggunakan tagar #IdeaForMob dan platform lainnya yang lebih tersembunyi (Ganjanakhundee 2021).

Namun, kurangnya struktur administratif dan koordinasi yang kuat menyebabkan gerakan terfragmentasi, dengan setiap aksi dilakukan secara independen untuk menghindari pengawasan polisi dan militer (Lertchoosakul 2021). Meskipun protes di provinsi menunjukkan pola baru dalam politik Thailand, dampaknya terhadap pengambilan keputusan di ibu kota masih terbatas. Aksi di luar ibu kota tidak hanya fokus pada isu nasional tetapi juga lokal (Lertchoosakul 2021). Selain itu, jaringan

gerakan pemuda tidak memiliki rencana jangka panjang selain melakukan protes harian dan hanya berharap bahwa aksi di Bangkok dapat memberikan tekanan politik yang signifikan

2. Dampak Propaganda Negara dan Gerakan Balasan

Taktik lain yang digunakan pemerintah adalah propaganda dan gerakan balasan, yang memperparah fragmentasi gerakan pemuda dengan melemahkan solidaritas dan kepercayaan antar anggotanya. Propaganda mendistorsi tujuan gerakan dengan menggambarkan mereka sebagai “pembenci bangsa” yang mengancam stabilitas nasional sehingga menciptakan kebingungan dan mengurangi dukungan publik (Ganjanakhundee 2021). Selain itu, pemerintah membentuk unit seperti Information Operations (IO) yang aktif menciptakan narasi balasan dan melancarkan perang informasi terhadap aksi gerakan pemuda di media sosial. Pada Oktober 2020, Twitter menghapus lebih dari 926 akun terkait militer yang menyebarkan propaganda dan disinformasi (Ganjanakhundee 2021). Unit ini menyebarkan berita bohong untuk menciptakan kebingungan dan memperkuat kesan negatif terhadap gerakan. Ini menyulitkan gerakan untuk mempertahankan kesatuan tujuan, terutama ketika anggota yang beragam merespons tekanan ini secara berbeda.

Selain itu, gerakan balasan yang didukung negara berkontribusi pada fragmentasi dengan menciptakan ancaman langsung terhadap keselamatan peserta aksi. Kelompok seperti Rubbish Collection Organization tidak hanya melakukan protes tandingan tetapi juga kekerasan terhadap gerakan pemuda (Article 19 2022:47). Kekerasan dan intimidasi ini membuat partisipasi dalam gerakan semakin berisiko, sehingga mengakibatkan kegentaran. Ancaman ini meluas ke protes daring, di mana kelompok seperti Thailand Help Centre for

Cyberbullying Victims melaporkan aktivitas yang dianggap mencemarkan monarki dan menandai lokasi rumah aktivis di Google Maps, yang mengakibatkan pengawasan lebih ketat dari pihak berwenang (Bangkok Post 2021a). Akibatnya, mereka yang tetap bertahan dalam gerakan menjadi terisolasi dan terfragmentasi karena biaya untuk berpartisipasi dan berasosiasi satu sama lain menjadi sangat tinggi.

3. Konflik Internal dan Prioritas yang Berbeda

Gerakan pemuda tidak hanya menghadapi tekanan eksternal dari taktik pemerintah, tetapi juga tantangan internal terkait taktik, tujuan, dan metode protes. Konflik internal ini mengakibatkan perpecahan dan fragmentasi. Berbagai faksi memiliki visi berbeda tentang hasil yang diinginkan dan strategi untuk mencapainya, seperti prioritas beberapa kelompok pada reformasi monarki, sementara yang lain fokus pada reformasi politik atau isu keadilan sosial yang lebih luas (Taptim 2021). Perbedaan ideologi ini menciptakan kesulitan dalam kolaborasi, melemahkan kemampuan mereka untuk mengartikulasikan tuntutan kolektif dan mencapai tujuan bersama.

Awalnya, kelompok seperti FYM dan UFTD memiliki tujuan yang sama, tetapi kemudian muncul kelompok lain dengan agenda dan aksi protes terpisah. Bad Student (Nakrian leo), yang terdiri dari siswa sekolah menengah elite, fokus pada reformasi pendidikan (The Strait Times 2020). Sementara itu, Seri Thoy Plus lebih menekankan kesetaraan dan hak-hak kelompok LGBTQ+ (Bangkok Post 2020e). Perbedaan ini menyebabkan fragmentasi dengan menciptakan faksi-faksi yang memiliki prioritas berbeda dalam gerakan (Chottsawas 2021).

Sementara itu, eskalasi konflik internal dalam gerakan pemuda terlihat dari seringnya perubahan nama dan logo kelompok serta konflik antar faksi. Misalnya, FYM pada awalnya bergerak dengan slogan REDEM (Restart Democracy), yang berkonflik dengan gerakan

Khana Ratsadon 2563 (The People's Party 2020) atau UFTD yang juga mengubah namanya menjadi Ratsadon (The People) (Taptim 2021). Pada Desember 2020, FYM kembali mengubah nama menjadi RT (Restart Thailand) dengan logo berwarna merah dengan huruf R dan T yang menyerupai gambar palu dan arit yang dapat diartikan sebagai simbol dukungan terhadap komunisme (Taptim 2021). Pemimpin Ratsadon seperti 'Penguin' menjauhkan diri dari FYM, melanjutkan perjuangan dengan aksi protesnya sendiri (Taptim 2021). Konflik internal di antara pemimpin dan aktivis, termasuk kritik terhadap pernyataan seksis atau insensitif dari pemimpin laki-laki seperti 'Penguin', juga membuat hubungan di dalam gerakan menjadi tegang (Reed 2020). Insiden-insiden ini merusak kepercayaan dan solidaritas dan menunjukkan kegagalan gerakan untuk berkonsolidasi, membaginya menjadi kelompok-kelompok kecil yang menunjukkan terjadinya fragmentasi.

Selain itu, perselisihan mengenai metode perlawanan memperdalam perpecahan dalam gerakan. Siswa dari sekolah kejuruan, yang menekankan isu ekonomi dan dikenal sebagai Thalu Gas, memilih menggunakan kekerasan untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap respons pemerintah terhadap pandemi, yang mengakibatkan kesulitan keuangan dan tingginya tingkat putus sekolah (Unno 2021). Mereka mengubah jalan di Din Daeng, Bangkok, menjadi medan pertempuran melawan polisi pada awal Agustus 2021 (Thai PBS World 2021b). Pada 14 Agustus, kelompok baru bernama Thalu Fa meningkatkan ketegangan dengan menggunakan senjata tajam, bom kecil, dan bom molotov (Thai PBS World 2021a). Aksi ini dikutuk oleh rekan mahasiswa yang mendukung perlawanan nirkekerasan dan cara-cara parlementer. Ini mencerminkan ketidakmampuan gerakan untuk menyatukan taktik dan tujuan, yang menyebabkan fragmentasi (Vice News 2020).

Oleh karena itu, konflik internal mengenai ideologi, strategi, dan metode protes telah

memfragmentasi gerakan pemuda di Thailand. Perpecahan ini melemahkan kemampuan untuk bersatu dan mengadvokasikan suara secara efektif, sehingga merusak kapasitas gerakan untuk mengartikulasikan kepentingannya.

HASIL DAN IMPLIKASI

Penelitian ini menyoroti permasalahan ketimpangan representasi politik pemuda Thailand dalam isu demokratisasi pasca-Pemilu 2019 dengan menggunakan konsep demokrasi yang terdepolitisasi dari Törnquist (2009) melalui dua mekanismenya, yaitu terdepolitisasinya isu publik dan terfragmentasinya gerakan rakyat. Penelitian ini berkontribusi dengan beberapa cara. Pertama, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan representasi politik dengan menggunakan pendekatan berbasis kekuasaan. Pendekatan ini mengkritik pendekatan kultur politik (Almond & Verba 2003) dan pembangunan institusi (Nelson 2011), yang dalam konteks Thailand, di mana terdapat institusi demokrasi dan masyarakat sipil yang aktif, tidak memadai untuk menjelaskan ketimpangan representasi politik.

Dengan memanfaatkan pendekatan berbasis kekuasaan dan konsep demokrasi yang terdepolitisasi, penelitian ini menganalisis proses akuntabilitas dalam rantai kedaulatan rakyat (*chain-of-popular-sovereignty*) melalui tiga komponen representasi, yaitu kemampuan rakyat untuk menyampaikan aspirasi, kontrol rakyat atas urusan publik, dan peran perantara antara rakyat dan urusan publik (Törnquist 2009:10-13). Pendekatan ini mampu mengungkap pembajakan elite dalam proses politik melalui hambatan struktural dalam aturan dan institusi formal seperti konstitusi, serta kondisi lingkungan yang menghalangi kemampuan rakyat untuk berkonsolidasi. Sehingga, ketimpangan representasi politik di negara-negara demokrasi cacat (*defective democracy*) seperti Thailand dapat dipahami

dengan lebih baik. Karenanya, pendekatan berbasis kekuasaan menawarkan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual mengenai permasalahan representasi politik.

Kedua, mengungkap strategi elite Thailand dalam mempertahankan kekuasaan melalui pembajakan demokrasi dan kudeta lembut (*soft coup*). Sejak Revolusi 1932, Thailand telah mengalami siklus kudeta militer, tetapi sejak 2020, terjadi pergeseran menuju kudeta halus, di mana elite memanfaatkan mekanisme legal untuk mengekang oposisi dan membatasi partisipasi politik tanpa kekerasan. Elite menggunakan argumen *Thai-style democracy* yang berarti Thailand memiliki model demokrasi sendiri untuk membenarkan penyimpangan prinsip-prinsip demokrasi, selama struktur formal demokrasi tetap ada (Hewison & Kitirianglap 2010).

Praktik ini telah menyebabkan pembubaran partai oposisi Future Forward Party (FFP) pada 2020, dan sayangnya, hal yang sama terulang dengan pembubaran Move Forward Party (MFP) pada 2024, serta larangan berpolitik selama 10 tahun bagi pemimpin mereka, Thanathorn Juangroongruangkit dan Pita Limjaroenrat (Jatusripitak, 2024). Ini menunjukkan bahwa meskipun oposisi berhasil memenangkan pemilu, kekuasaan elite dapat mengesampingkan hasil tersebut melalui mekanisme konstitusional yang dirancang untuk melindungi kepentingannya, menciptakan ilusi demokrasi di mana rakyat memiliki kontrol terbatas atas isu publik.

Ketiga, berkontribusi pada studi Asia Tenggara dengan menyoroti kemunduran demokrasi di Thailand sebagai bagian dari tren yang lebih luas di kawasan tersebut. Di Thailand, Filipina, dan Indonesia, elite politik menggunakan konstitusi untuk melindungi kepentingan mereka, mengikis nilai-nilai demokrasi, dan membentuk dinasti politik, terutama melalui pengaruh dalam sistem peradilan dan pengangkatan hakim berbasis

koneksi pribadi (Dressel & Bonian 2024). Manipulasi konstitusi ini memungkinkan elite di ketiga negara tersebut mempertahankan kekuasaan tanpa memicu perhatian negatif internasional yang biasa muncul akibat kudeta atau intervensi militer.

Keempat, menyoroti pemuda sebagai kekuatan sosio-politik baru yang signifikan di Thailand. Pemuda menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memanfaatkan teknologi dan metode inovatif untuk memobilisasi perubahan. Hasilnya, pemuda memenangkan kursi terbanyak ketiga di parlemen pada pemilu 2019 dan terbanyak pada 2023, serta memimpin protes terbesar dalam sejarah Thailand (Jatusripitak 2024). Keterampilan teknologi juga memungkinkan terbentuknya jaringan solidaritas domestik maupun internasional, seperti gerakan Milk Tea Alliance. Keunggulan ini tidak hanya memperkuat posisi pemuda Thailand, tetapi juga mencerminkan potensi pemuda secara luas untuk berkolaborasi dalam menciptakan perubahan.

Kelima, memperkaya studi aktivisme dan gerakan sosial dengan mengungkap tantangan yang dihadapi pemuda dalam lingkungan otoriter. Fragmentasi di kalangan pemuda terjadi akibat tekanan eksternal dan konflik internal, yang mendorong penggunaan strategi seperti perlawanan tanpa pemimpin yang berfokus pada desentralisasi. Meskipun pendekatan ini dapat mendukung keberlangsungan gerakan, desentralisasi juga dapat memecah gerakan menjadi kelompok-kelompok kecil yang beroperasi secara mandiri dengan beragam ideologi dan strategi. Ini dapat mengurangi efektivitas gerakan secara keseluruhan.

Sebagai penutup, penulis mengakui beberapa keterbatasan. Pendekatan berbasis kekuasaan mungkin tidak sepenuhnya menjelaskan dinamika kompleks representasi politik di lapangan, sehingga penelitian lebih lanjut tentang representasi politik perlu terbuka terhadap berbagai interpretasi dan pendekatan alternatif. Selain itu, fokus penelitian yang

terbatas pada periode pasca-Pemilu 2019 hingga pembubaran parlemen pada 2023 serta ketergantungan pada sumber sekunder dapat memengaruhi generalisasi temuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel Abraham, and Sidney Verba. 1963. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Article 19. 2022. (rep.). Thailand: Denying the Demand for Democracy. Article 19. Retrieved April 18, 2023, from https://www.article19.org/wp-content/uploads/2022/12/A19-Protests-Under-Threat_THAI_DEC-22.pdf.
- Bangkok Post. 2018. "20-year national strategy comes into effect." Bangkok Post. Retrieved April 18, 2023, from <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1557462/20-year-national-strategy-comes-into-effect>.
- . 2020a. "FFP dissolved, executives banned for 10 years." Bangkok Post. Retrieved July 15, 2024, from <https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1862769/ffp-dissolved-executives-banned-for-10-years>.
- . 2020b. "Ilaw charter draft favoured by protesters rejected." Bangkok Post. Retrieved March 31, 2023, from <https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/2021823/ilaw-charter-draft-favoured-by-protesters-rejected>.
- . 2020c. "Ilaw submits Bill backed by 100,000." Bangkok Post. Retrieved March 31, 2023, from <https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1989851/ilaw-submits-bill-backed-by-100-000>.
- . 2020d. "Parliament delays charter vote, set up panel." Bangkok Post. Retrieved March 31, 2023, from <https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1991059/parliament-delays-charter-vote-set-up-panel>.

- . 2020e. "Silom rally demands equal rights, democracy." Bangkok Post. Retrieved July 15, 2024, from <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2015779/silom-rally-demands-equal-rights-democracy>.
- . 2020f. "Students submit manifesto." Bangkok Post. Retrieved March 31, 2023, from <https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1975175/students-submit-manifesto>.
- . 2021a. "Google takes down maps targeting hundreds of Thais accused of opposing king." Bangkok Post. Retrieved September 07, 2024, from <https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/2140279/google-takes-down-maps-targeting-hundreds-of-thais-accused-of-opposing-king>.
- . 2021b. "Move forward dissolution sought." Bangkok Post. Retrieved April 26, 2023, from <https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/2061415/move-forward-dissolution-sought>.
- Barrington, Lowell W. 2009. *Comparative Politics: Structures and Choices*. Belmont, CA: Wadsworth Publishing.
- Baxter, Pamela, and Susan Jack. 2008. "Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers." *The Qualitative Report* 13(4):544-559. Retrieved from <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2008.1573>.
- BBC News. 2020. "Future forward: Thai pro-democracy party dissolved over loan." BBC News. Retrieved March 31, 2023, from <https://www.bbc.com/news/world-asia-51585347>.
- Beetham, David. 1999. *Democracy and Human Rights*. Oxford: Polity Press.
- BenarNews. 2020. "Thai mps expect no action on monarchy after discussing protesters' demands." BenarNews. Retrieved March 31, 2023, from <https://www.benarnews.org/english/news/thai/session-ends-10272020171256.html>.
- Burnham, Peter. 2014. "Depoliticisation: Economic crisis and political management." *Policy & Politics* 2(2):189-206. Retrieved from <https://doi.org/10.1332/030557312X655954>.
- CH3Thailand. 2018. "“สมศักดิ์”พปชร.แจกคำพูด รธน.ฉบับนี้“ดี”ขึ้นมาเพื่อพวกเรา." CH3Thailand. Retrieved November 23, 2018, from <https://web.archive.org/web/20181123221832/http://news.ch3thailand.com/politics/82092>.
- Chia, Jasmine, and Erich Parpart. 2020. "Understanding the Formation of the Crown Property Bureau and Why It Matters to Protesters." *Thai Enquirer*. Retrieved March 31, 2023, from <https://www.thaienquirer.com/21061/understanding-the-formation-of-the-crown-property-bureau-and-why-it-matters-to-protesters/>.
- Chottsawas, Chonlatit. 2021. "Towards Unifying a Movement: A Reflection on the Current Situation of the Thai Democratic Movement." *Protest* 1(1):143-146. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1163/2667372X-01010007>.
- Deutsche Welle (DW). 2020. "Thai protesters demand king renounce royal fortune." Deutsche Welle. Retrieved March 31, 2023, from <https://www.dw.com/en/thailand-protesters-demand-king-renounce-royal-fortune/a-55727609>.
- Djani, Lucky, Olle Törnquist, Osmar Tanjung, and Surya Tjandra. 2017. *Dilemmas of Populist Transactionalism: What are the Prospects Now for Popular Politics in Indonesia*. Yogyakarta: PolGov Publishing.
- Dressel, Björn, and Cristina Regina Bonoan. 2024. "Courts and authoritarian populism in Asia: Reflections from Indonesia and the Philippines." *Law & Policy* 46(3):277-297. Retrieved from <https://doi.org/10.1111/lapo.12240>.
- Engchanil, Aua-aree. 2020. "Contempt of Court Offence in Thailand: Question about Guarantee

- of Rights and Liberties." *The Journal of Faculty of Law Chulalongkorn University* 38(2). Retrieved from <https://issuu.com/chulalongkorn/docs/law-chula-journal-year-38th-issue-2-september-2563/s/15679614>.
- Freedom of Expression Documentation Center (FEDC). 2022. "Parasite that smiles: Pegasus spyware targeting dissidents in Thailand." Freedom of Expression Documentation Center. Retrieved April 26, 2023, from <https://freedom.ilaw.or.th/en/report-parasite-that-smiles>.
- Ganjanakhundee, Supalak. 2021. "Thailand in 2020: A Turbulent Year." In *Southeast Asian Affairs 2021*, edited by Daljit Singh and Malcolm Cook, 335-355. Singapore: ISEAS Publishing. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1355/aa21-1r>.
- Gilens, Martin. 2012. *Affluence and influence: Economic inequality and political power in America*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hessami, Zohal, and Mariana Lopes da Fonseca. 2020. "Female Political Representation and Substantive Effects on Policies: A Literature Review." *European Journal of Political Economy* 63. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2020.101896>.
- Hewison, Kevin, and Kengkij Kitirianglarp. 2010. "Thai-Style Democracy: The Royalist Struggle for Thailand's Politics." In *Saying the unsayable: Monarchy and democracy in Thailand*, edited by Soren Ivarsson and Lotte Isager, 179-202. Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies Press.
- Jagtiani, Sunil. 2018. "Thai King now holds Crown Property Bureau's Billions in assets." *Bloomberg*. Retrieved April 18, 2023, from <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-16/thai-king-now-holds-crown-property-bureau-s-billions-in-assets>.
- Jatusripitak, Napon. 2024. "MFP Dissolution: Inevitable But Not Inconsequential." *Fulcrum*. Retrieved September 07, 2024, from <https://fulcrum.sg/mfp-dissolution-inevitable-but-not-inconsequential/>.
- Jha, Preeti. 2020. "Thailand protest: Why young activists are embracing Hong Kong's tactics." *BBC News*. Retrieved April 18, 2023, from <https://www.bbc.com/news/world-asia-54626271>.
- Kingdom of Thailand. 1956. *Penal Code*, B.E. 2499. Bangkok. Retrieved from <https://faolex.fao.org/docs/pdf/tha208355.pdf>.
- . 2017. *Constitution of the Kingdom of Thailand* B.E. 2560. Bangkok, 6 April. Retrieved from http://www.constitutionalcourt.or.th/occ_en/download/article_20170410173022.pdf.
- . 2018. *Organic Act on the Election of Members of Parliament*, B.E. 2561. Bangkok. Retrieved from https://www.ect.go.th/ect_en/download/article/article_20210806135803.pdf.
- Kongkirati, Prajak. 2016. "Thailand's political future remains uncertain." *ISEAS Yusof Ishak Institute: Perspective* 42:1-7. Retrieved from https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/pdfs/ISEAS_Perspective_2016_42.pdf.
- Lertchoosakul, Kanokrat. 2021. "The white ribbon movement: High school students in the 2020 Thai youth protests." *Critical Asian Studies* 53(2):206-218. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/14672715.2021.1883452>.
- Liengboonlertchai, Ponson. 2021. "Do you hear the people sing?: Thais demand a democratic constitution to replace the junta." *ConstitutionNet*. Retrieved April 26, 2023, from <https://constitutionnet.org/news/do-you-hear-people-sing-thais-demand-democratic-constitution-replace-junta>.
- Mansbridge, Jane. 1999. "Should blacks represent blacks and women represent women? A contingent 'yes'." *The Journal of Politics* 61(3):628-657. Retrieved from <https://doi.org/10.2307/2647821>.

- McCargo, Duncan. 2021. "Disruptors' dilemma? Thailand's 2020 Gen Z protests." *Critical Asian Studies*, 53(2):175-191. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/14672715.2021.1876522>.
- Mishra, Neeraj. 2011. "Unravelling governance networks in development projects: Depoliticization as an analytical framework." *Environment and urbanization ASIA*, 2(2):153-168. Retrieved from <https://doi.org/10.1177/097542531100200202>.
- Nelson, Michael H. 2011. "Political Representation in Thailand: Problems of Institutional Development." *Samaggi Sara: Annual Issue 82*:24-28. Retrieved from https://www.academia.edu/2176357/Political_Representation_in_Thailand_Problems_of_Institutional_Development.
- Nikkei Asia. 2020. "Thailand parliament discards most Constitutional Reform Ideas." *Nikkei Asia*. Retrieved April 18, 2023, from <https://asia.nikkei.com/Politics/Turbulent-Thailand/Thailand-parliament-weighs-changing-constitution-as-protests-rage>.
- North, Douglas Cecil. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press. Retrieved from <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>.
- Olsen, Marisa Elena. 2023. *Challenging Power: Youth Activism in the Thai Pro-Democracy Movement (2020-2022)*. Master's thesis, Oslo Metropolitan University. Retrieved from <https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/3089435>.
- Pattaya Mail. 2021. "Thai parliament voted Down Charter Amendment Bill in third reading Wednesday night." *Pattaya Mail*. Retrieved April 26, 2023, from <https://www.pattayamail.com/thailandnews/thai-parliament-voted-down-charter-amendment-bill-in-third-reading-wednesday-night-347704>.
- Pitkin, Hanna Fenichel. (1967). *The concept of representation*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Prachatai. 2020. "ประมวลชุมนุม #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน 'เราไม่ต้องการปฏิรูปเราต้องการปฏิวัติ'." *Prachatai*. Retrieved March 31, 2023, from <https://prachatai.com/journal/2020/08/88977>.
- Prachatai. 2021. "Ruling Party member finds monarchy budget cut proposal 'a threat to the regime'." *Prachatai*. Retrieved March 31, 2023, from <https://prachataienglish.com/node/9416>.
- Ratcliffe, Rebecca. 2021. "Thai court rules calls for curbs on monarchy are 'abuse of freedoms'." *The Guardian*. Retrieved April 26, 2023, from <https://www.theguardian.com/world/2021/nov/10/thai-court-rules-calls-for-curbs-on-monarchy-are-abuse-of-freedoms>.
- Reed, John. 2020. "Inside Thailand's Youth Revolution." *Financial Times*. Retrieved March 31, 2023, from <https://www.ft.com/content/c2a530ba-a343-4007-a324-c2d276b95883>.
- Sangiam, Tanakorn. 2021. "Move forward party challenges Lese-Majeste Law in Parliament." *NBT World*. Retrieved March 31, 2023, from <https://nbtworld.prd.go.th/en/news/detail/TCATG210211011650496>.
- Sastramidjaja, Yatun. 2023. "Rhizome vs Regime: Southeast Asia's Digitally Mediated Youth Movements." *ISEAS Yusof Ishak Institute: Perspective 6*:1-27. Retrieved from https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2023/02/TRS6_23.pdf.
- Sattaburut, Aekarach, and Nattaya Chetchotiros. 2020. "Govt Pleads for Charter Support." *Bangkok Post*. Retrieved March 31, 2023, from <https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1990503/govt-pleads-for-charter-support>.
- Sawasdee, Siripan Nogsuan. 2020. "Electoral integrity and the repercussions of institutional manipulations: The 2019 general election in Thailand." *Asian Journal of Comparative*

- Politics 5(1):52-68. Retrieved from <https://doi.org/10.1177/2057891119892321>.
- South China Morning Post (SCMP). 2020. "Who pays for the Thai monarchy?" South China Morning Post. Retrieved March 31, 2023, from <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3111195/thailand-protesters-take-aim-king-vajiralongkorns-royal-funding>.
- Stockemer, Daniel, and Aksel Sundström. 2018. "Age Representation in Parliaments: Can Institutions Pave the Way for the Young?" *European Political Science Review* 10(3):467-490. Retrieved from <https://doi.org/10.1017/S1755773918000048>.
- Tanakasempipat, Patpicha. 2021. "Thai govt files Royal Insult Complaint after criticism of its vaccine strategy." Reuters. Retrieved April 26, 2023, from <https://www.reuters.com/article/us-thailand-politics/thai-government-files-royal-insult-complaint-against-opposition-figure-over-vaccine-criticism-idUSKBN29PORV/>.
- Taptim, Tulsathit. 2021. "Confusing picture of Thai protests." Thai PBS World. Retrieved April 18, 2023, from <https://www.thaipbsworld.com/confusing-picture-of-thai-protests/>.
- Thai Enquirer. 2020. "Understanding the formation of the Crown Property Bureau and why it matters to protesters." Thai Enquirer. Retrieved March 31, 2023, from <https://www.thaienquirer.com/21061/understanding-the-formation-of-the-crown-property-bureau-and-why-it-matters-to-protesters/>.
- Thai Lawyers For Human Rights (TLHR). 2022. "November 2022: At least 1,886 people were politically prosecuted in 1,159 cases." Thai Lawyers for Human Rights. Retrieved February 29, 2024 from <https://tlhr2014.com/en/archives/51466>.
- Thai PBS World. 2021a. "35 protesters detained, weapons seized during Sunday's protests in Bangkok." Thai PBS World. Retrieved April 18, 2023, from <https://www.thaipbsworld.com/35-protesters-detained-weapons-seized-during-sundays-protests-in-bangkok/>.
- 2021b. "Is talugas part of two-pronged strategy by anti-government protesters?" Thai PBS World. Retrieved April 18, 2023, from <https://www.thaipbsworld.com/is-talugas-part-of-two-pronged-strategy-by-anti-government-protesters/>.
- The Star. 2021. "Thai court conditionally approves Constitutional Amendment bids." The Star. Retrieved April 18, 2023, from <https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2021/03/12/thai-court-conditionally-approves-constitutional-amendment-bids>.
- The Strait Times. 2020. "Thailand's 'Bad Student' campaigners demand education reform." The Strait Times. Retrieved July 15, 2024, from <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailands-bad-student-campaigners-demand-education-reform>.
- Törnquist, Olle. 2009. "Introduction: The Problem Is Representation! Towards an Analytical Framework." In *Rethinking Popular Representation*, edited by Olle Törnquist, Neil Webster, and Kristian Stokke, 1-23. London: Palgrave Macmillan.
- Unno, Anusorn. 2021. "'Thalu Gas': The Other Version of the 'Thai Youth Movement'." ISEAS Yusof Ishak Institute: Perspective 146:1-11. Retrieved from https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2021/10/ISEAS_Perspective_2021_146.pdf.
- Verba, Sidney. 2003. "Would the dream of political equality turn out to be a nightmare?" *Perspectives on Politics* 1(4):663-679. Retrieved from <https://doi.org/10.1017/S1537592703000458>.
- Vice News. 2020. "Thailand's Youth are Challenging the Government in the Biggest Push for Democracy Yet." [Video]. Retrieved April 18, 2023, from <https://youtu.be/bArS29-INOQ>.

Wacharasindhu, Parit. 2021. "Opinion: Abolishing the Senate is a new minimum for constitutional reform." Thai Enquirer. Retrieved April 18, 2023, from <https://www.thaienquirer.com/16927/opinion-abolishing-the-senate-is-a-new-minimum-for-constitutional-reform/>.